

Kebangsaan Indonesia di Masa Depan

Sarwono KUSUMAATMADJA*

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang tiada henti untuk mencapai cita-cita bersama bangsa. Dalam masa Orde Baru usaha untuk mencapai cita-cita bangsa itu telah dituangkan dalam berbagai keputusan politik yang saling berkait satu dengan lainnya sehingga bagi siapa pun akan jelas bahwa Orde Baru menganut sistem tertentu dalam mencapai cita-cita bangsa itu. Dokumen yang secara komprehensif memuat rencana bangsa adalah GBHN, yang merupakan pencerminan dari kehendak kita semua, dan dirumuskan secara demokratis konstitusional. Jika kita rajin mengikuti proses terbentuknya GBHN maka kita pun segera sadar bahwa cita-cita bangsa hanya dapat terwujud melalui proses politik. Proses politik tersebut seidak-tidaknya menunjukkan dua variabel besar. Katakanlah satu variabel tetap yang kita namakan falsafah dan konstitusi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945. Variabel lain adalah variabel yang senantiasa bersifat dinamis dan penuh perubahan yaitu masyarakat bangsa itu sendiri. Jika keduanya dipadukan dalam suatu pengertian umum serta diletakkan dalam konteks pembangunan nasional, maka dapatlah dikatakan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha untuk mengendalikan perubahan masyarakat sehingga terdapat kemajuan-kemajuan yang dikehendaki dalam suatu kesinambungan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam keseluruhan UUD 1945, baik Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya. Dengan perkataan lain melalui proses pembangunan nasional kita menghendaki agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh bangsa adalah dalam rangka mencapai kondisi-kondisi di segala bidang sehingga dengan berjalannya waktu cita-cita bangsa akan makin lama makin nyata tampak.

*Sekjen Golkar.

Oleh karena itu maka setiap bahasan mengenai masa depan bangsa tidak akan terlepas dari dua pokok besar, yaitu pertama, penegasan mengenai konsep dasar kebangsaan kita yang tidak lain adalah Pancasila dan UUD 1945, serta yang kedua, adalah persepsi tentang perubahan-perubahan yang akan timbul dan yang ingin ditimbulkan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa itu. Persepsi yang tepat mengenai kedua pokok besar tadi adalah esensial karena tanpa adanya persepsi yang jelas maka berbagai masalah besar dapat timbul, yang akan menyebabkan bangsa kita kehilangan orientasi. Dalam keadaan di mana orientasi tidak jelas, maka akan timbul satu situasi di mana masalah demi masalah yang muncul, baik yang diperkirakan maupun tidak, diselesaikan secara sepotong-sepotong dengan hanya memperhitungkan manfaat-manfaat sesaat dan sepihak sehingga akhirnya terdapat suatu kondisi yang kita tidak inginkan yaitu terlupakannya fakta sejarah bahwa sebenarnya bangsa Indonesia mempunyai variabel tetap dalam dirinya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Kondisi sedemikian amat berbahaya karena bangsa yang membangun tanpa kesadaran akan cita-citanya, dan tanpa kemampuan untuk mewujudkan cita-cita itu dalam perbuatannya akan pasti berantakan. Sebaliknya bangsa yang sanggup mewujudkan cita-cita bangsanya secara sadar akan menjadi bangsa yang besar.

Indonesia mempunyai kemampuan untuk menjadi bangsa yang besar karena memenuhi segala prasyarat untuk mencapai hal itu. Dari segi penduduk, Indonesia adalah kelima terbesar di dunia. Kekayaan alam kita boleh dikatakan lengkap dinilai dari potensi bahan-bahan strategis yang kita miliki. Letak geografi Indonesia dengan sendirinya akan meminta peranan internasional yang penting karena berada dalam jalur lalu-lintas dunia yang vital. Seluruh prasyarat itu hanya dapat berarti jika kita dapat mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang bukan hanya cerdas, ulet dan rajin namun juga mempunyai kemauan emotif untuk menjadi bangsa yang besar. Satu hal juga yang patut kita garis bawahi adalah bahwa potensi untuk menjadi bangsa yang besar harus mampu kita wujudkan. Kalau kita tidak melakukannya maka dalam masa yang penuh dengan persaingan ini, dapat dipastikan bahwa kepentingan-kepentingan dunia mana pun akan berusaha menjadikan bangsa Indonesia sebagai semacam bangsa kelas dua. Membiarkan diri kita menjadi bangsa kelas dua sama saja dengan mengingkari amanat para pendiri Republik yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dewasa ini terdapat semacam kerinduan akan nasionalisme. Gejala ini sehat karena menunjukkan adanya keinginan untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih disegani dan dihormati. Namun adalah keliru jika kita menyangka bahwa pembangunan nasional yang kita lakukan selama Orde Baru tidak mencerminkan kehendak untuk mempertinggi taraf kehormatan bangsa. Di masa yang lalu, mungkin karena tingkat kedewasaan bangsa kita

belum memadai dan juga karena masalah-masalah dalam negeri, kita pernah memperlihatkan diri dengan wajah bangsa pemberang. Kepuasan emosional yang didapatkan dari sikap yang demikian itu ternyata tidak membuahkan hasil, karena pada dasarnya sikap berang itu hanyalah upaya menutupi kelemahan-kelemahan politik dalam negeri yang telah menciptakan krisis politik dan ekonomi yang berpuncak pada peristiwa G-30-S/PKI. Sesudah kejadian itu, kita melaksanakan politik luar negeri kita dengan lebih rasional dan bernada rendah tetapi tetap memperlihatkan wajah bangsa yang teguh. Peranan Indonesia yang konstruktif dalam ASEAN adalah salah satu bukti yang nyata. Demikian juga peranan Indonesia dalam kelompok-kelompok negara berkembang merupakan peranan positif dalam rangka menarik perhatian dunia internasional akan ketimpangan-ketimpangan dalam tata hubungan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Kemandirian Indonesia diperlihatkan dalam sikapnya yang prinsipial dan selalu dipegang teguh sejak awal, kendatipun dalam sistem yang berbeda-beda yaitu bahwa kita tidak pernah membiarkan diri kita terikat dalam pakta militer dengan negara mana pun. Sikap-sikap dasar itu penting untuk diingat karena tanpa menyadari hal itu hubungan-hubungan internasional yang kita lakukan dalam rangka pembangunan ekonomi dapat ditafsirkan sebagai politik kapitulasi terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi dunia tertentu. Hubungan ekonomi yang erat dengan beberapa kalangan internasional tertentu, tidak perlu selalu dilihat sebagai penghalang bagi kemandirian bangsa. Karena dalam situasi dunia yang demikian penuh saling ketergantungan, hubungan dengan pihak yang lebih kuat tidak dapat dielakkan. Politik isolasi bukanlah jawaban yang memuaskan dibuktikan oleh kegagalan dari negara-negara yang menganut politik itu dalam meninggikan taraf hidup bangsanya. Sebaliknya kita juga menyaksikan betapa bangsa Jepang, sebagai suatu contoh, yang setelah Perang Dunia Kedua mengalami kehancuran total dapat bangkit sebagai kekuatan ekonomi raksasa yang dalam banyak hal telah melebihi Amerika Serikat yang membantunya bangkit dari kehancuran ekonominya.

Oleh karena itu jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa, harus dilihat dalam diri kita sendiri. Sukses atau tidaknya kita mengurus hubungan luar negeri merupakan cerminan dari usaha-usaha dalam negeri kita. Usaha-usaha dalam negeri harus sukses sehingga hubungan luar negeri akan menunjang harkat martabat bangsa. Usaha-usaha dalam negeri kita yang meliputi seluruh bidang kehidupan bangsa, adalah pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Oleh karena itulah menjadi amat penting, seperti diuraikan di muka, untuk menyatukan persepsi tentang Pancasila. Menyatukan persepsi tentang Pancasila ini amat menentukan konsistensi bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya.

Dalam rangka penyamaan persepsi tentang Pancasila, kita mau tidak mau harus mengambil pendekatan sejarah. Sejarah bukanlah kumpulan dari mitos

yang didongengkan secara turun-temurun, namun selalu harus didasarkan pada fakta-fakta yang teruji. Dengan demikian sejarah dalam satu segi, mempunyai unsur objektif. Semua fakta sejarah harus dihormati apa adanya. Namun sejarah tidak terlepas dari subjektivitas politik yang selalu berusaha menempatkan fakta-fakta sejarah dalam konteks yang menguntungkan suatu maksud politik tertentu. Dalam keadaan di mana Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional, perdebatan mengenai Pancasila dengan pembuktian sejarah menurut kepentingan politik masing-masing kelompok politik, akan tetap hidup dan merupakan dialog politik yang amat penting. Dari segi kepentingan bangsa secara keseluruhan, sesuai pula dengan hakikat Pancasila sebagai ideologi nasional, maka kita harus selalu berusaha menumbuhkan subjektivitas bangsa secara utuh mengenai Pancasila. Tentunya, subjektivitas ini hanya mempunyai kebenaran sejarah, jika kita mampu membuktikan bahwa Pancasila tumbuh dari perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Bukti-bukti ini dapat kita gali dari perjuangan bangsa dalam melawan kolonialisme yang pada zaman Kebangkitan Nasional memuncak dengan tercetusnya Sumpah Pemuda, serta kemudian menumbuhkan pergerakan politik yang bersifat kebangsaan dan memuncak lagi dengan Proklamasi Kemerdekaan serta penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Corak bangsa Indonesia dicerminkan pula oleh motto bangsa yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam perjalanan selanjutnya ide kebangsaan mengalami pasang-surut karena berlakunya sistem politik yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kendatipun demikian tradisi perjuangan kebangsaan telah cukup tertanam dibuktikan dengan fakta sejarah bahwa setiap puncak krisis politik selalu menyebabkan bangsa kita menegaskan komitmennya terhadap Pancasila dan UUD 1945 itu. Akhirnya pada tahun 1966 bangsa kita mengambil pelajaran sejarah bahwa Pancasila dan UUD 1945 harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dalam zaman Orde Baru Pancasila dalam penjabarannya muncul melalui gagasan-gagasan nasional yang dirumuskan dalam ketetapan-ketetapan MPR, yaitu P-4 dan GBHN khususnya Wawasan Nusantara. Oleh karena itulah Pancasila sebenarnya adalah ideologi yang tumbuh dari tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam persamaan nasib dan cita-cita, sehingga konsep kebangsaan kita tidak berdasarkan persamaan ras, etnik, kedaerahan dan agama. Pada proses selanjutnya Pancasila kemudian melahirkan gagasan nasional yang konsisten. Pemahaman sejarah itu perlu bukan untuk kemudian tenggelam dalam sejarah, namun untuk meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam menyusun masa depan. Pemahaman sejarah yang tidak mencerminkan tekad untuk mengutamakan keutuhan dan persatuan bangsa, akan membawa akibat bahwa semangat pengamalan Pancasila akan menyeleweng dari maksudnya. Kita harus bersikap waspada dan tegas dalam hal ini karena di masa mendatang bukan mustahil kita akan mendengar gagasan-gagasan yang mempunyai latar belakang sejarah yang sepiantas-lalu mungkin terdengar baik namun dapat mempertajam perbedaan

perbedaan dalam bangsa yang majemuk ini. Kita akan meletakkan kerangka landasan pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa, yang antara lain berarti bahwa gagasan-gagasan kebangsaan kitalah yang nantinya akan merupakan isi dan jiwa dari sistem nasional kita.

Pengalaman politik masa lalu yang mengancam keutuhan bangsa serta menghambat pencapaian taraf hidup rakyat yang lebih baik telah membuahkan stabilitas nasional yang diperlukan sehingga pembangunan nasional secara bertahap dan berencana dimungkinkan atas dasar tekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai memang mengagumkan sehingga pembangunan nasional Indonesia merupakan salah satu cerita sukses bagi negara-negara berkembang. Suksesnya pembangunan ini akan membawa persamaan nasib dan cita-cita bangsa Indonesia dalam cakrawala yang lebih luas. Suksesnya pembangunan telah menyelesaikan banyak masalah-masalah dasar yang sebelumnya menjadi persoalan-persoalan yang kronis tidak kunjung selesai, apakah politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dengan taraf kehidupan yang lebih tinggi dewasa ini maka akan timbul tuntutan dan prioritas yang mungkin saja telah dapat diduga maupun belum. Di samping itu, struktur usia manusia Indonesia yang mayoritasnya terdiri dari orang-orang muda akan membawa prospek dan tantangan tersendiri. Prospek karena dengan demikian kita tidak kekurangan tenaga produktif di masa depan, tantangan karena tenaga produktif tersebut jika tidak disalurkan akan merupakan problem sosial yang besar. Orang-orang muda usia ini sebagian besar tumbuh dan berkembang dalam suasana stabil sehingga persepsinya mengenai masalah-masalah keutuhan nasional, stabilitas serta politik pasti akan berbeda dengan generasi terdahulu yang menghadapi konflik fisik maupun politik secara langsung dan terbuka. Oleh karena itu ide persamaan nasib dan cita-cita harus disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan baru yang timbul ini. Pengamalan Pancasila harus dilihat sebagai upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber jawaban bagi masalah-masalah nasional kita di masa depan. Akan tidak memadai lagi jika Pancasila kita kaitkan hanya dengan keutuhan dan persatuan bangsa dalam pengertiannya dahulu yaitu mengatasi perpecahan bangsa semata-mata.

Keutuhan dan persatuan bangsa harus kita satukan pengertiannya dengan lebih terwujudnya rasa senasib dan secita-cita, oleh karena itu harus ditumbuhkan melalui peningkatan solidaritas nasional yang dapat dirasakan gemanya oleh semua orang. Dijadikannya Pancasila sebagai satu-satunya asas harus dilihat dalam pengertian pembinaan solidaritas nasional ini, sehingga di masa-masa mendatang masalah-masalah pembangunan yang bersifat kualitatif serta berbobot sosial budaya harus mendapat perhatian bersama.

Usaha ini melibatkan semua pihak karena mustahil untuk mengharapkan bahwa masalah-masalah nasional kita hanya akan terselesaikan secara politis,

apalagi secara politis dalam pengertian formal. Pembudayaan Pancasila adalah masalah semua orang sehingga masyarakat yang terorganisasi dalam berbagai bentuk kelompok kegiatan maupun spesialisasi mempunyai peranannya dalam pembentukan masyarakat Pancasila, melalui penciptaan pola tingkah laku, cara berorganisasi maupun penyusunan program yang akan memperkuat solidaritas bangsa serta mengatasi perbedaan-perbedaan etnik, ras, status sosial ekonomi maupun agama.

Politik mempunyai peranan besar karena melalui keputusan-keputusan politik dapat diwujudkan jaminan-jaminan objektif, misalnya persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, melalui produk-produk hukum. Namun perlu diingat bahwa produk-produk politik yang mencerminkan suatu idealisme tertentu tidak mungkin terwujud tanpa adanya kekuatan masyarakat yang terorganisasi serta mampu menciptakan iklim sosial yang mencerminkan idealisme tersebut.

Dunia usaha merupakan wahana yang penting dalam mewujudkan iklim ini, karena solidaritas dalam dunia usaha akan cepat terasa manfaatnya oleh banyak pihak. Sebaliknya ketimpangan ekonomi yang antara lain ditandai oleh tumbuhnya kelompok ekonomi yang kuat dan eksklusif, harus dianggap sebagai penghambat terwujudnya solidaritas sosial. Lemahnya solidaritas sosial ini akan menimbulkan masalah keamanan bagi bangsa maupun bagi elit ekonomi yang bersangkutan yang tidak dapat diselesaikan dengan memasang kaca anti-peluru, memelihara anjing herder atau tindakan-tindakan pengamanan lain yang justru menambah potensi konflik yang ada. Tindakan-tindakan kemanusiaan yang tentunya selalu beritikad baik tidak akan mewujudkan iklim solidaritas sosial selama tindakan kemanusiaan ini dikesankan sebagai upaya tanpa memahami konsep sosial budaya serta sosial politik di dalam mana solidaritas sosial ini mempunyai konteksnya. Oleh karena itu dunia usaha ekonomi kuat di Indonesia harus melancarkan usahanya dalam kerangka persamaan nasib dan cita-cita sehingga tidak dapat mengharapkan ketenangan usaha hanya dengan mengandalkan efisiensi usaha saja. Penyelesaian masalah politik dan budaya selalu tidak efisien sehingga pengusaha yang bijak harus selalu tahu kapan harus efisien dan kapan harus tidak efisien. Bayaran yang bisa diharapkan dalam mewujudkan solidaritas sosial adalah perasaan bangga bahwa sebagai bagian bangsa kita mampu menyumbangkan sesuatu yang hanya dapat diukur dengan kepuasan batin serta juga perasaan aman karena merasa berada dalam satu keluarga besar. Perasaan aman ini pada waktunya toh akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda.